

Antara Korupsi dan Sistem Akrual Pemerintah Daerah: Berdasarkan Kajian *Scoping Review*

Zulkarnaini¹, Mirna Indriani², Heru Fahlevi³, Nuraini⁴, Kheriah⁵, Miftahul Jannah⁶

¹*Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe*

Jln. B. Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

¹*Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Syiah Kuala
Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA*

^{2,3,4}*Universitas Syiah Kuala*

Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA

¹zulkarnaini@pnl.ac.id

²mirna_indriani@usk.ac.id

³hfahlevi@usk.ac.id

⁴nurainia@usk.ac.id

⁵kheriah79@gmail.com

⁶miftahuljannah@pnl.ac.id

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan sebuah analisis terhadap tingkat korupsi dalam sistem akrual pemerintahan daerah, yang merupakan hal ekstrim dan tanpa disadari telah mengorbankan kepentingan publik dan menumbuhkan budaya korupsi yang berkelanjutan. Studi ini mengkaji 11 artikel yang diperoleh melalui protokol *scoping review* dengan ruang lingkup korupsi dalam tatanan sistem akrual pemerintah daerah. Artikel diperoleh melalui *database Scopus*, yang dinilai telah mewakili selama kurun waktu satu dekade yaitu sejak tahun 2015-2025. Temuan studi menjelaskan bahwasanya fokus masalah terhadap korupsi dalam sistem akrual sektor publik, khususnya pemerintah daerah, telah menarik perhatian pemerintah bersama masyarakat untuk mengawasi dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah daerah yang mampu menekan tumbuhnya korupsi dan merusak tatanan kepentingan publik. Terdapat 5 (lima) fokus masalah utama yang diteliti, yaitu kontekstual pelaporan keuangan, tata kelola, lingkungan eksternal, sistem audit pemerintah serta keputusan penganggaran publik. Namun menariknya dari sisi yang berbeda, seiring perkembangan daerah yang telah melakukan reformasi sistem akrual, justru telah memberikan kesempatan dan celah masuknya korupsi. Hal ini jelas akan menimbulkan kekhawatiran yang serius bagaimana sebaiknya langkah strategis yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah dalam menghambat dan sekaligus menutup celah bagi aktor korupsi yang mampu berperan melalui skenario sistem akrual. Implikasi praktis: keberadaan aktor korupsi yang telah meluas dan mewabah dalam struktur pemerintahan, harus dibentengi melalui kebijakan yang ketat khususnya menyangkut masalah keuangan publik. Pemangku kepentingan harus menyadari bahwa aktor korupsi ada dalam tubuh sendiri, sehingga kebijakan yang dirancang ulang harus lebih transparan dan melibatkan publik sebagai pengawas. Pertimbangan terhadap kebijakan teknologi dalam mendeteksi terjadinya korupsi merupakan hal sangat penting untuk diterapkan. Originalitas: studi ini merupakan kajian khusus yang dilakukan terhadap dua hubungan ruang lingkup sekaligus yaitu korupsi dan sistem akrual, yang tidak hanya berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas, namun adanya nilai-nilai lainnya yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, dan tanpa disadari justru berasal dari aktor dalam tubuh pemerintahan sendiri.

Kata kunci— *Scoping review*, Tingkat korupsi, sistem akrual, dan aktor korupsi.

Abstract— This study aims to provide an analysis of the level of corruption in the local government accrual system, which is extreme and has unwittingly sacrificed the public interest and fostered a culture of ongoing corruption. This study examines 11 articles obtained through a scoping review protocol with the scope of corruption in the local government accrual system. Articles were obtained through the Scopus database, which is considered representative over a decade, from 2015-2025. The study findings explain that the focus on the problem of corruption in the public sector accrual system, especially local governments, has attracted the attention of the government and the public to monitor and support various local government policies that can suppress the growth of corruption and damage the public interest. There are 5 (five) main focus issues studied, namely the contextual financial reporting, governance, the external environment, the government audit system, and public budgeting decisions. However, interestingly from a different perspective, as the development of regions that have reformed the accrual system, it has actually provided opportunities and gaps for the entry of corruption. This clearly raises serious concerns about the strategic steps that local governments should take to hinder and simultaneously close the gaps for corrupt actors who are able to play a role through the accrual system scenario. Practical implications: the existence of corrupt actors that have spread and become endemic within the government structure, must be fortified through strict policies, especially regarding public finance issues. Stakeholders must realize that corrupt actors exist within the body itself, so that redesigned policies must be more transparent and involve the public as a supervisor. Consideration of technology policies in detecting corruption is very important to implement. Originality: This study is a special study conducted on two relationships at once, namely corruption and the accrual system, which are not only related to transparency and accountability, but also the existence of other values that are influenced by the external environment, and unknowingly actually originate from actors within the government itself.

Keywords— Scoping review, level of corruption, accrual system, and actor of corruption.

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Permasalahan korupsi dalam konteks pemerintah, menjadi satu topik yang sangat mendunia untuk diselesaikan. Berbagai

macam persoalan yang muncul seperti kelemahan institusi, ketimpangan kekuasaan, rendahnya akuntabilitas maupun kondisi politik yang tidak stabil [1], telah menyita perhatian publik sangat tinggi, dan bahkan fenomena tersebut sudah memasuki fase yang sangat serius dan mengancam

keberlanjutan sistem operasional pemerintah. Perkembangan korupsi yang sangat masif saat ini, justru menjamur disaat hampir seluruh pemerintah di dunia mengadopsi sistem akrual dalam mengelola keuangan negara ([2]; [3]; [4]), karena sistem berbasis kas dianggap mudah terafiliasi terkait korupsi [5]. Konsep akrual yang sangat kuat dengan relevansi dan realibilitas keuangan pemerintah, ternyata belum optimal membendung arus korupsi yang semakin merajalela, padahal disisi lain sistem akrual mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah [6]. Kondisi ini akan sangat berbahaya bagi pemerintah dalam mengendalikan sistem tata kelola keuangan negara, apabila tidak ditangani dengan serius melalui mekanisme yang terstruktur dengan cermat, cepat dan tepat. Apabila diperhatikan dengan seksama, maka dampak yang ditimbulkan sangatlah luas dan signifikan yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik [7], dan pada akhirnya berdampak bagi penurunan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Dampak-dampak yang muncul sudah pasti tidak dapat dibiarkan dan harus dicarikan jalan keluarnya, sehingga dapat mengembalikan stabilitas bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik.

Khususnya pemerintah daerah, praktik korupsi yang marak terjadi di berbagai negara ternyata telah melahirkan dampak multidimensi yang meliputi kontekstual terhadap hukum, ekonomi, sosial, politik maupun budaya ([8]; [9]; [10]; [11]). Dari sisi hukum, korupsi telah menggerogoti tatanan peradilan yang hampir setiap kasus menjadi sebuah tontonan publik atas ketidakseimbangan berbagai putusan dan sulit untuk dilawan ([12]; [13]). Demikian pula halnya dari sisi ekonomi, dimana tingkat pemanfaatan sumber daya yang seharusnya sesuai, akhirnya menjadi tidak efektif dan efisien yang berujung pada ketidakstabilan skala perekonomian negara [14]. Persoalan sosial juga menjadi sasaran empuk dari efek korupsi yang berdampak pada kesenjangan taraf hidup masyarakat sehingga menurunkan kualitas dan harapan hidup ([15]; [16]). Sejalan dengan hal tersebut, dalam lingkup politik, korupsi juga telah menyusup dalam tubuh pemerintahan secara institusional, yang selanjutnya menimbulkan lemahnya legitimasi pemerintah di mata publik [17]. Begitu pula dalam konteks budaya, keberadaan korupsi telah mendorong perilaku yang tidak etis bagi pertumbuhan psikologi budaya, sehingga muncul stigma berkelanjutan yang saling menyerang antar masyarakat [18]. Keseluruhan dampak tersebut harus benar-benar dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem atau tata kelola secara masif dan terorganisir dengan baik melalui sistem atau praktik baik dalam memberantas korupsi.

Pengelolaan dampak yang muncul dari tindakan korupsi haruslah dilaksanakan dengan basis komitmen dan konsisten oleh seluruh aktor yang ada dalam tubuh pemerintah daerah. Integritas yang kuat dan tindakan yang tegas dalam berbagai kasus yang ada, menjadi kunci utama dalam mencegah atau memberantas korupsi [19]. Semakin tinggi integritas bagi aktor atau aparatur pemerintah maka akan semakin rendah tingkat korupsi yang terus terjadi. Hal ini dapat dipastikan sistem pemerintahan akan berjalan baik secara komprehensif, dengan jaminan bahwa pola pengelolaan korupsi dapat dijadikan sebagai sebuah desakan kuat terhadap perubahan tata kelola sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah wajib memastikan bagian-bagian mana saja yang sudah terafiliasi oleh korupsi, sehingga memudahkan langkah strategis yang akan diambil.

Langkah-langkah strategis yang kongkrit telah banyak dilakukan oleh pemerintah seperti membentuk badan-badan formal negara yang dijadikan sebagai penghubung dalam melihat berbagai perilaku aktor korupsi (misalnya di Indonesia dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi). Selain itu, bahkan masyarakat melalui lembaga-lembaga khusus yang independen baik tingkat lokal maupun internasional untuk mengawasi praktik korupsi, terus bertumbuh dan memberikan atensi yang sangat kuat (misalnya Transparency International). Keberadaan lembaga-lembaga tersebut sampai ke tingkat daerah, telah menjadi simbol perlawanan, penolakan sampai penghancuran bahwasanya korupsi tetap menjadi momok yang harus dibasmi dan dihabisi dengan menggunakan metode-metode tertentu melalui berbagai kebijakan, termasuk metode ilmiah yang mengedepankan riset.

Studi terdahulu tentang korupsi sangat bervariasi dengan mengangkat objek permasalahan yang dinilai semakin berkembang, mulai dari pengamatan perilaku koruptor [18], strategi tindakan pencegahan [20], sampai kepada pengamatan terhadap berbagai objek korupsi ([21]; [3]; [22]). Hal-hal ini sudah pasti membutuhkan berbagai dukungan dari pemerintah sehingga output yang dihasilkan dari sebuah riset dapat dijadikan rekomendasi dalam bentuk berbagai kebijakan dan tindakan perbaikan. Oleh karena itu, pemahaman dan komitmen pemerintah wajib menjadi pondasi utama untuk menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan akurat bagaimana sebaiknya korupsi ditangani dan dikendalikan dengan lebih efektif. Barangkali dari sudut pandang politik yang identik dengan konsep kepemimpinan pemerintah, korupsi akan menjadi sesuatu yang “tidak akan pernah hilang”. Namun demikian, pemerintah harus memiliki sistem yang ampuh untuk membaca pergerakan korupsi, sehingga akar yang mulai tumbuh dapat memberikan sinyal kuat untuk ditekan dengan mudah dan tidak akan menyentuh permukaan tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, sangat beralasan apabila korupsi dijadikan sebagai musuh paling berbahaya dengan tindakan dan aksi perlawanan secara besar-besaran dalam tubuh pemerintah.

I.2. Sistem Akrual Pemerintah Daerah

Sistem akrual merupakan bagian dari sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada peraturan International *Public Sector Accounting Standard* (IPSAS) yang berada dibawah naungan *International Federation of Accountants* (IFAC). Lembaga ini bertanggungjawab dalam mengakselerasi peraturan akuntansi secara khusus bagi pemerintahan diseluruh dunia, dengan tujuan untuk mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas dan efisiensi sektor publik ([23]; [24]). Hal ini sangat sesuai dengan tuntutan publik yang menginginkan adanya perlawanan terhadap korupsi dalam mengamankan dan menjamin pengelolaan yang lebih baik terhadap dana publik. Namun bukti empiris menunjukkan bahwa dalam praktik atau implementasinya, sistem akrual telah menghasilkan pertentangan hasil riset baik antar negara maupun dalam satu negara [25]. Berbagai dampak positif maupun negatif dari adanya sistem akrual bagi pemerintah daerah yang berujung pada perdebatan ilmiah, namun tetap memiliki kerangka yang kuat dalam membuktikan berbagai pendapat. Di Indonesia, menurut [26], adopsi sistem akrual ditandai dengan berlakunya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan negara. Negara Hungaria, [27] menjelaskan

bahwa dampak positifnya adalah pemerintah daerah telah menemukan bahwa sistem akrual telah membantu pemerintah fokus pada kinerja dan efisiensi publik. Demikian pula di negara Nigeria yang mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan pemerintah [6]. Lebih jauh lagi [23] menemukan bahwa negara-negara yang tergabung dalam OECD juga merasakan manfaat dari meningkatnya *good governance* bagi pemerintah. Demikian pula halnya di negara Pakistan, peneliti telah menemukan nilai positif terhadap perbaikan dalam sistem manajemen keuangan pemerintah daerah [28].

Namun dalam konteks sisi negatif, peralihan sistem keuangan pemerintah daerah menjadi akrual juga telah dialami diberbagai negara didunia, diantaranya Indonesia, misalnya [29] juga menemukan bahwa perubahan sistem kas menjadi akrual ternyata belum mampu merubah kebiasaan pemerintah daerah, sehingga sistem akrual justru menjadi sebuah sistem yang terabaikan. Selanjutnya [30] juga menemukan bahwa Indonesia telah mengalami ketidakefisienan dalam lingkup sektor publik. Demikian pula halnya dengan negara Tanzania yang mengadopsi sistem akrual dan pada akhirnya hanya menjadi sebuah tontonan publik [31]. Bahkan di Jepang tingkat ekspektasi dari informasi keuangan pemerintah menjadi rendah [32], atau hal yang lebih membahayakan lagi terjadi di Yunani dan Italia yang telah membuka celah terjadinya perilaku *earnings management* dikalangan politisi dan pemerintah daerah [33].

Hasil empiris yang telah dipaparkan di atas, membuktikan satu hal bahwasanya sistem akrual menjadi perhatian publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dalam lingkup sektor publik, khususnya pemerintah daerah. Temuan-temuan tersebut telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengendalikan sistem keuangan yang pada dasarnya secara teoritis, sistem akrual mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Walaupun berbagai pendapat atau temuan yang inkonsisten satu sama lain, hal ini membuktikan bahwa pentingnya melihat permasalahan akrual dari berbagai sudut pandang. Pemerintah daerah perlu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pilihan keputusan yang lebih berkualitas dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam mendorong terciptanya *good governance* yang bersih serta pelayanan publik terbaik.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini merupakan sebuah kajian *Scoping Review* yang merupakan kajian terhadap berbagai studi mencakup area “korupsi pemerintahan daerah” yang saat ini banyak dihadapi oleh berbagai negara di dunia dalam lingkup sektor publik pemerintahan yang telah mengimplementasikan sistem akrual. Topik ini sangat menarik untuk diangkat, karena sejak berlakunya sistem akrual yang telah diadopsi hampir seluruh negara di dunia, justru masih banyak ditemukan perilaku aktor-aktor korupsi yang sudah sangat meresahkan dan telah menggerogoti sistem tata kelola keuangan pemerintahan yang bersih.

Dalam desain metodologi yang dibangun untuk memperoleh hasil atau kesimpulan dari kajian berbagai studi, maka studi ini menggunakan hanya database Scopus sebagai dasar penentuan berbagai studi terkait. Masa pengamatan dan kajian ditetapkan dari tahun 2015-2025 yang dianggap mewakili dari satu dekade terakhir implementasi sistem akrual

yang mampu memberikan bentuk pola yang pasti dari sebuah pengamatan tindakan korupsi. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai terhadap studi yang ditelaah, maka perlu diperhatikan protokol yang menjadi prosedur dalam menentukan jumlah studi yang dinilai sangat relevan dijadikan sebagai bahan kajian utama. Tabel 1 berikut menunjukkan protokol yang digunakan dalam studi ini.

Tabel 1. Protokol *Scoping Review*

No	Keterangan	Jumlah Artikel
1	Kata kunci pencarian ‘corruption’ dalam judul artikel, abstrak, dan kata kunci	53.764
2	Tambah: AND ‘local government’ dalam judul artikel, abstrak, dan kata kunci	978
3	Pembatasan dalam menu “refine search” menggunakan kata ‘accrual’	15
4	Pembatasan tahun publikasi 2015-2025	13
5	Pembatasan pada area ‘Business, Management and Accounting’	12
6	Spesifikasi jenis dokumen ‘article’, keterangan publikasi ‘final’, jenis sumber data ‘journal’, dan bahasa ‘English’	11
7	Jumlah total artikel akhir yang diperoleh dan dianalisis	11

Sumber: Data diolah (Penulis: 2025)

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah studi yang relevan untuk dikaji sebanyak 11 studi yang terdaftar dalam database *Scopus*. Studi yang akan dikaji meliputi hasil penelitian dari keseluruhan studi yang mengandung topik korupsi dalam lingkup sistem akuntansi akrual khususnya di pemerintah daerah dalam kurun waktu satu dekade. Konteks sistem akrual menjadi lingkup yang akan dijelaskan berikut ini terhadap 11 studi yang diperoleh dalam rentang waktu 2015-2025. Mengacu pada hasil telaahan 11 artikel, maka secara umum konteks korupsi dalam kerangka sistem akrual menyoroti 5 (lima) ruang lingkup permasalahan yang saling terhubung sebagai berikut:

- Kontekstual laporan keuangan;** perilaku korupsi sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah daerah menyusun laporan keuangan sebagai basis dalam mempertanggungjawabkan dana publik.
- Tata kelola pemerintahan;** pengaruh korupsi sangat berdampak bagi tata kelola pemerintah daerah, dimana pemerintah harus melihat segala aspek yang memungkinkan dalam menutupi celah terjadinya korupsi mulai dari aspek administratif sampai aspek keuangan.
- Lingkungan eksternal;** terdapat hubungan pemerintah daerah dengan lingkungan eksternal atau stakeholder yang berkepentingan secara langsung dalam berbagai hal melalui kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah daerah.
- Audit pemerintah daerah;** salah satu bagian krusial yang sangat konsisten terhadap perilaku korupsi adalah audit pemerintah daerah. Tindakan ini sangat berdampak dalam mendeteksi dan menghambat para aktor korupsi dalam merencanakan tindakan negatif bagi keberlanjutan operasional pemerintah daerah.
- Keputusan anggaran;** tindakan korupsi sangat mempengaruhi keputusan anggaran pemerintah daerah, karena celah atau peluang yang tinggi terjadinya korupsi pada saat penetapan awal anggaran dilaksanakan.

Dari 5 fokus utama dan 11 studi yang telah ditelaah di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya keterkaitan dengan permasalahan korupsi pada dasarnya telah mengakibatkan berbagai persoalan besar dalam konteks pemerintah daerah. Kondisi ini harus mendapat respon langsung dari pemerintah daerah dan publik untuk lebih meningkatkan pengawasan yang intensif serta mendorong pemerintah untuk menetapkan berbagai kebijakan yang berpotensi menutup celah atau menghambat terjadinya korupsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1. Analisis Deskriptif

Prosedur yang telah dibahas pada protokol perolehan database Scopus akan diperjelas kembali melalui analisis deskriptif bagian-bagian data yang memberikan gambaran

secara utuh terhadap 11 studi yang akan ditelaah. Melalui 5 (lima) fokus penting yang mewakili masing-masing studi, telah ditetapkan berdasarkan tahun sebaran studi (*article by the year*), kerangka teori (*theoretical framework*), sumber data (*source of data*), jenis metode penelitian (*type of research*), area negara (*demographic area*) dan artikel berdasarkan sitasi (*Citation*). Sebelum membahas lebih jauh masing-masing fokus studi, dapat dilihat rekapitulasi tabel studi yang menjadi pembahasan dalam studi ini. Pembagian fokus penelitian bervariasi dari setiap studi, bahkan terdapat satu studi yang melihat lebih dari satu lingkup masalah. Secara keseluruhan sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Artikel Terpilih

Peneliti/Publikasi	Fokus	Hasil Penelitian	Lingkup Masalah
[34]/ <i>Australian Accounting Review</i>	Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan	Meskipun laporan keuangan menjadi lebih transparan, korupsi di tingkat pemerintah daerah masih tetap tinggi karena berbagai faktor, seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya tindak lanjut atas temuan audit oleh aparat penegak hukum	- Kontekstual laporan keuangan
[35]/ <i>Management Science</i>	Kampanye anti korupsi	Kampanye anti-korupsi meningkatkan efektivitas subsidi pemerintah dalam mendorong inovasi dengan mengalihkan alokasi subsidi dari praktik korupsi menuju penilaian berbasis merit, sehingga mendukung pertumbuhan inovasi yang lebih berkelanjutan di perusahaan-perusahaan China	- Lingkungan eksternal
[36]/ <i>Journal of Accounting and Public Policy</i>	Budaya korupsi lokal dan kualitas akuntansi	Korupsi memengaruhi kualitas akuntansi melalui budaya korupsi lokal yang membentuk insentif dan perilaku perusahaan dalam pelaporan keuangan. Penangkapan pejabat korup mengubah budaya ini dan mendorong peningkatan kualitas akuntansi.	- Lingkungan eksternal - Kontekstual laporan keuangan
[37]/ <i>Accounting</i>	Pengambilan keputusan anggaran	Memperkuat kepercayaan dan sistem pengambilan keputusan yang transparan dan kolektif sangat penting untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.	- Keputusan anggaran
[38]/ <i>Public Money and Management</i>	Reformasi NPM dan peran audit pemerintah	Meskipun reformasi New Public Management (NPM) di Indonesia telah memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dan memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), reformasi tersebut belum berhasil meningkatkan akuntabilitas dan memberantas korupsi secara efektif.	- Audit pemerintah daerah
[39]/ <i>Public and Municipal Finance</i>	Pengaruh penerapan NPM dan korupsi	Desentralisasi fiskal efektif dan tidak memicu korupsi, perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat seperti peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan audit independen yang efektif.	- Audit pemerintah daerah - Kontekstual laporan keuangan
[40]/ <i>Review of Quantitative Finance and Accounting</i>	Tingkat korupsi dan manajemen laba politik lokal	Perusahaan yang beroperasi di daerah dengan tingkat korupsi politik lokal yang tinggi cenderung melakukan manajemen laba baik melalui manajemen akrual maupun manipulasi aktivitas nyata, seperti percepatan penjualan dan overproduksi. Selain itu, perusahaan di daerah korup memiliki kualitas laba yang lebih rendah, laba yang kurang persisten, dan lebih sering menggunakan akrual diskresioner baik untuk meningkatkan maupun menurunkan laba.	- Lingkungan eksternal - Kontekstual laporan keuangan
[41]/	Manfaat	Implementasi akuntansi akrual yang belum	- Kontekstual laporan

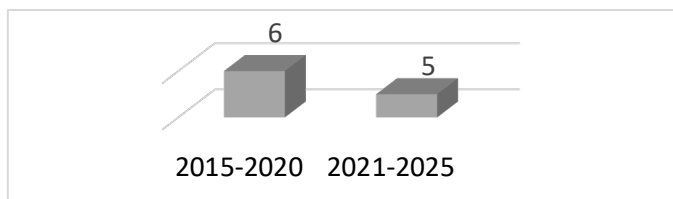
Peneliti/Publikasi	Fokus	Hasil Penelitian	Lingkup Masalah
<i>International Journal of Scientific and Technology Research</i>	informasi akuntansi berbasis akrual	optimal dapat menyebabkan berbagai kasus korupsi dan penyimpangan, seperti pemindahan aset dan penyalahgunaan dana dalam pembelian aset pemerintah. Hal ini terjadi karena kualitas pelaporan keuangan yang rendah dan informasi akuntansi yang tidak digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan, yang sebagian disebabkan oleh keterbatasan kemampuan sumber daya manusia.	keuangan
[42]/ <i>Accounting and Business Research</i>	Hubungan korupsi pejabat publik dengan keterbacaan laporan keuangan perusahaan	Perusahaan yang berlokasi di daerah dengan tingkat korupsi politik yang lebih tinggi cenderung mengungkapkan laporan tahunan yang kurang mudah dibaca. Hal ini berlaku tanpa memandang kinerja perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan manajer yang lebih mampu di daerah korup cenderung lebih mungkin untuk menyamarkan informasi dalam laporan tahunan mereka guna meminimalkan pengambilan rente oleh pejabat korup.	- Lingkungan eksternal
[26]/ <i>International Journal of Financial Research</i>	<i>Analisa hasil audit opini BPK</i>	Adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan pada lembaga pemerintah Indonesia selama periode 2012-2017. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah opini audit wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dan menurunnya opini wajar dengan pengecualian atau disclaimer. Penelitian juga menemukan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan oleh BPK berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.	- Audit daerah pemerintah
[22]/ <i>Review of Integrative Business and Economics Research</i>	Tata kelola pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa discretionary accruals (DA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di pemerintah provinsi Indonesia. Artinya, semakin tinggi praktik <i>discretionary accruals</i> , semakin besar kemungkinan terjadinya korupsi. Hal ini karena DA digunakan untuk mengelola laporan keuangan yang dapat membuka peluang terjadinya kecurangan atau korupsi. Sebaliknya, transparansi dan akuntabilitas tidak terbukti secara empiris berpengaruh signifikan dalam mengurangi korupsi di tingkat pemerintah provinsi.	- Tata kelola pemerintahan

Total: 11 Artikel Terpilih

Sumber: Data Diolah (Penulis: 2025)

a. Tahun sebaran artikel

Untuk melihat bagaimana perkembangan penelitian terhadap topik korupsi terkait sistem akuntansi akrual sejak tahun 2015-2025, maka sebaran studi dapat dibagi ke dalam periode 5 (lima) tahun. Hal ini akan memudahkan penulis dalam merangkum perkembangan penelitian terhadap topik korupsi terkait sistem akuntansi akrual. Grafik 1 berikut memperlihatkan sebaran studi selama rentang waktu tahun 2015-2025.



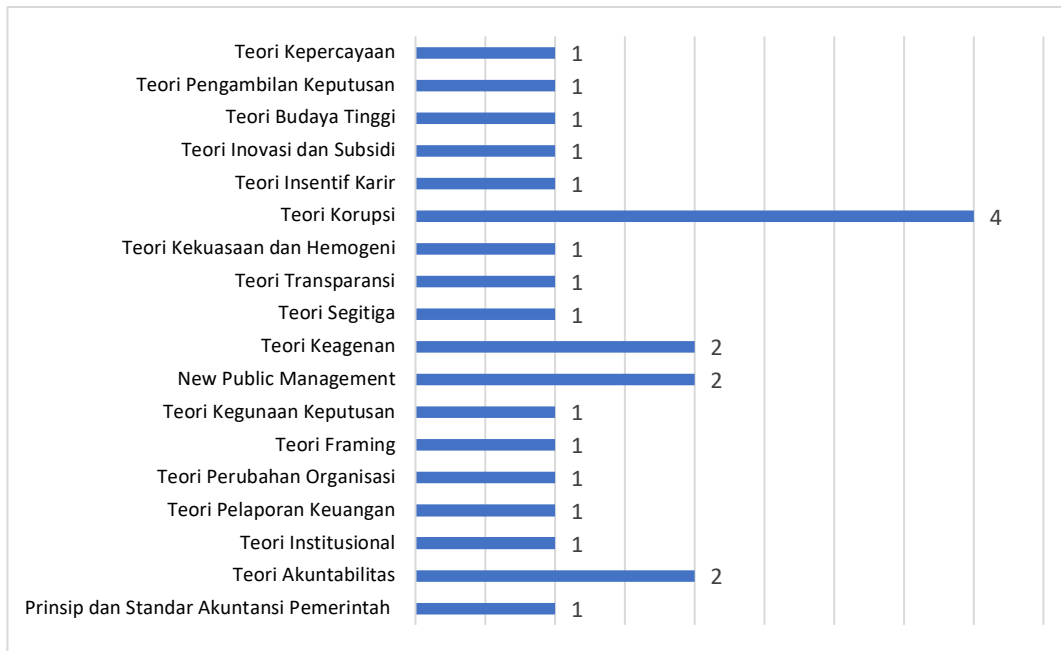
Grafik 1. Artikel Berdasarkan Tahun

Berdasarkan Grafik 1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah artikel yang dihasilkan dalam rentang waktu lima tahun, dapat dikatakan berimbang. Hal ini mengindikasikan bahwa minat peneliti terhadap topik korupsi dalam lingkup sistem akrual pemerintah daerah menjadi konsumsi publik yang dianggap cukup penting untuk kemajuan sistem keuangan daerah.

b. Kerangka teoritis

Menyangkut kerangka teoritis yang digunakan oleh peneliti, sangat beragam dan menunjukkan adanya kekayaan analisis dari berbagai sudut pandang serta permasalahan. Teori menjadi satu pondasi bagi peneliti dalam menjustifikasi alasan maupun pendapat yang dikemukakan sehingga sangat penting melihat kajian kerangka teoritis sebagai bagian dari kerangka berfikir dan penentuan hipotesis atau pertanyaan penelitian.

Grafik 2 berikut dapat dilihat variasi kerangka teori yang digunakan oleh peneliti.

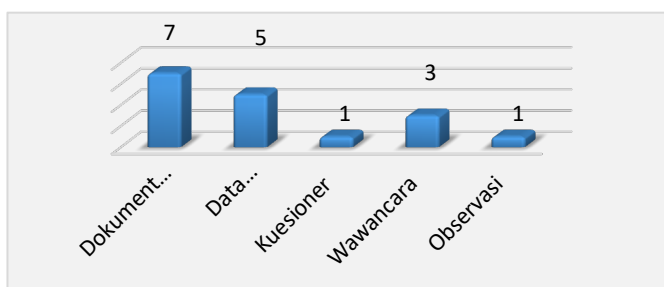


Grafik 2. Kerangka Teoritis

Melihat kerangka teori yang digunakan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa terkait topik korupsi dalam lingkup sistem akrual, ternyata memiliki kerangka teori yang sangat bervariasi, bahkan dalam satu studi digunakan lebih dari satu kajian teori. Walaupun teori korupsi lebih dominan atau 22% dibandingkan teori lain, namun sekitar 78% menunjukkan bahwasanya sudut pandang korupsi sangatlah luas dan memiliki dampak terhadap berbagai sisi dalam sistem pemerintah daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa riset terhadap korupsi terafiliasi dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam sistem akuntansi atau keuangan pemerintah.

c. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dari seluruh studi yang dikaji, sangat bervariasi tergantung dari metode penelitian yang digunakan. Sumber data tersebut terkait dengan bagaimana cara memperoleh data yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini menjadi syarat dalam menyimpulkan hasil penelitian, sehingga kesimpulan yang dibangun tidak hanya sekedar narasi atau deskripsi tanpa ada bukti atau ukuran yang jelas. Dengan demikian sumber perolehan data dapat dijadikan sebagai indikator dari kekuatan hasil penelitian. Grafik 3 berikut akan memperlihatkan sumber data yang diperoleh melalui berbagai pendekatan, sehingga sampai pada hasil penelitian yang diputuskan.

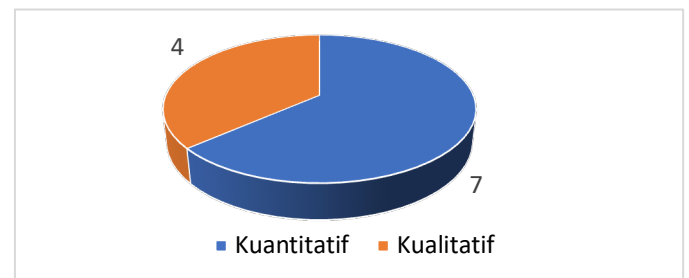


Grafik 3. Sumber Data

Berdasarkan Grafik 3, dapat dilihat bahwasanya sistem dokumentasi (7) merupakan pilihan data yang paling banyak digunakan oleh peneliti, yang kemudian diikuti oleh data sekunder (5). Hal ini menunjukkan bahwa topik korupsi sangat relevan diteliti melalui bukti dokumentasi atau data secara tertulis ataupun dokumen data yang tersedia untuk langsung dianalisis. Disamping hal tersebut, bukti empiris terkait korupsi dengan menggunakan data yang siap digunakan, menunjukkan bahwasanya perilaku korupsi identik dengan bukti tertulis yang mudah meninggalkan historis dan mudah untuk ditelusuri dalam sebuah sistem. Saat ini perkembangan teknologi menjadi pilihan yang tepat dalam menekan jumlah kasus atau tingkat korupsi dilingkungan pemerintah daerah.

d. Jenis penelitian

Jenis penelitian merupakan dasar penentuan bagi peneliti untuk menetapkan berbagai bentuk metodologi lainnya yang relevan. Metode penelitian akan menuntun peneliti untuk konsisten dalam menyampaikan hasil penelitian, dan kemudian membuat berbagai kesimpulan. Metode penelitian juga memberikan alur berfikir bagi peneliti dalam merumuskan berbagai justifikasi. Grafik 4 berikut

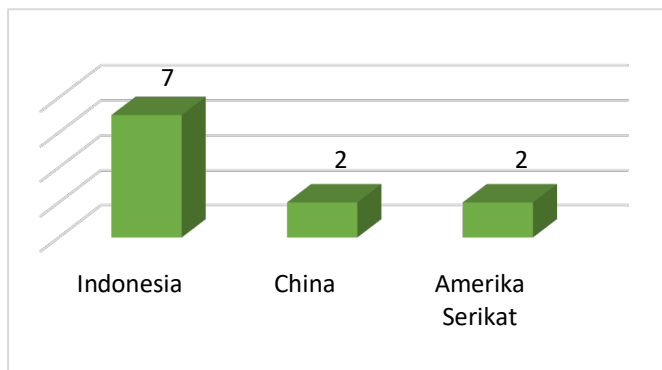


menunjukkan adanya berbagai metode atau jenis penelitian yang digunakan.

Grafik 4. Jenis Penelitian

e. Demografis negara

Setiap negara memiliki area atau demografi yang berbeda-beda baik dilihat dari sisi budaya, politik, hukum maupun sosial masyarakat. Kondisi ini jelas akan memberikan hasil yang berbeda-beda pula, sehingga hasil penelitian yang diperoleh secara terstruktur akan berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung dengan faktor-faktor tersebut. Demikian halnya dengan pemerintahan yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu di setiap negara, sehingga hasil penelitian juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Hal ini justru menjadi sebuah “keunikan” tersendiri bagi setiap negara dalam memberantas korupsi melalui sistem akrual dalam keuangan negara. Grafik 5 berikut memperlihatkan berbagai negara yang menjadi referensi lokasi penelitian terkait topik korupsi.



Grafik 5. Demografis Negara

Grafik 5 menunjukkan bahwa peminatan peneliti sangat tinggi di Indonesia dibandingkan dua negara lain dalam rentang waktu 2015-2025. Konteks negara menunjukkan bahwasanya kasus korupsi dapat dilihat dari pertumbuhan sebuah negara, seperti Indonesia yang masih tergolong negara sedang berkembang. Dari analisis jumlah kasus korupsi, ternyata jauh lebih tinggi di negara sedang berkembang dibandingkan negara maju. Hal ini disebabkan banyak hal, diantaranya penggunaan teknologi yang minim atau kemampuan sumber daya yang masih rendah, sehingga strategi atau teknik pendeteksi korupsi yang digunakan masih lemah dan terbatas.

f. Jumlah sitasi artikel

Pengaruh sitasi dari sebuah artikel sangat mempengaruhi kualitas artikel, dimana semakin banyak jumlah sitasi menunjukkan bahwa kualitas riset dalam artikel semakin tinggi sehingga dijadikan sumber rujukan bagi peneliti lainnya. Tabel 3 menunjukkan jumlah sitasi artikel dari yang paling tinggi.

Tabel 3. Jumlah Sitasi Berdasarkan Artikel

No	Judul	Peneliti	Sitasi
1	Corruption culture and accounting quality	[36]	50
2	The effect of local political corruption on earnings quality	[40]	45
3	Anticorruption, Government Subsidies, and Innovation: Evidence from China	[35]	40
4	Political corruption and annual report readability: evidence from the United States	[42]	34
5	Examining the unintended outcomes of NPM reforms in Indonesia	[38]	26
6	Evaluating the Implementation of a Mandatory Dual Reporting System: The Case of Indonesian Local Government	[34]	19
7	New public management and corruption: Empirical evidence of local governments in Indonesia	[39]	7
8	Usefulness analysis of accrual-based accounting information on local government financial statement: A qualitative study	[41]	5
9	The Effect of Good Government Governance and Discretionary Accrual on the Level of Corruption in Indonesia's Local Government	[22]	5
10	The role of budget decision making in mediating trust, social ties, cultural context and local government performance	[37]	2
11	Analysis of audit opinion of financial statements from state institutions: Indonesia empirical study, period 2012-2017	[26]	1
Total: 11 Artikel			

Sumber: Data Diolah (Penulis, 2025)

III.2. Temuan dan Diskusi

Menurut [23] bahwa minat penelitian terhadap sistem akuntansi akrual masih tinggi dalam lingkup pemerintah daerah. Pendapat ini merupakan hasil empiris terkait sistem akrual secara umum, yang kemudian dapat dikaitkan dengan

konteks korupsi yang saat ini masih terkait dengan titik kelemahan sistem keuangan pemerintah daerah ([22]; [4]; [43]). Berbagai tindakan dan perilaku menyangkut korupsi, telah mendorong turunnya kualitas sistem pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta telah merusak

kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan [19]. Pemerintah perlu menciptakan satu kerangka yang kokoh untuk membentuk satu kekuatan dalam melawan korupsi [44], serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan sehat baik dalam pengelolaan administrasi ataupun sistem keuangan.

a. Kontekstual Laporan Keuangan

Peran dari sebuah laporan keuangan berbasis akrual merupakan hal yang paling berpengaruh dalam menjelaskan terciptanya akuntabilitas dan transparansi bagi kinerja pemerintah daerah [6]. Sistem akuntansi akrual yang saat ini telah diadopsi oleh pemerintah daerah, menjadi satu bukti dalam rangka memperkuat dan menambah manfaat dari pentingnya laporan keuangan yang berkualitas tinggi sehingga membantu pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya korupsi ([39]; [3]). Dalam konteks akrual, laporan keuangan mampu menunjukkan sebuah kondisi informasi yang relevan dan reliabel, sehingga tingkat kepastian dan keandalan informasi dapat diperoleh dengan baik. Namun demikian, celah korupsi tetap masih tidak dapat dibendung dengan maksimal, karena terdapatnya kelemahan penegakan hukum dan kurangnya tindak lanjut atas temuan audit oleh aparat penegak hukum [34], atau adanya pemindahan aset dan penyalahgunaan dana dalam pembelian aset pemerintah [41]. Selanjutnya lebih jauh lagi menurut [34] bahwa tidak adanya lembaga pengawas independen juga telah melemahkan upaya pengawasan dan pemberantasan korupsi melalui pelaporan keuangan. Hal ini merupakan rahasia publik yang terus menerus menjadi isu korupsi dalam tatanan sistem pemerintah daerah, sehingga sangat perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan yang kuat [39], dan mengupayakan berbagai langkah tepat dalam mendorong berfungsinya supremasi hukum maupun peran sumber daya manusia dalam sistem keuangan daerah.

Disamping hal yang telah dijelaskan di atas, kontekstual laporan keuangan juga menyangkut hubungan pemerintah daerah dengan perusahaan yang menjadi partner dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Aktor pemerintahan yang menjadi oknum korupsi, telah merusak sistem hubungan dan kerjasama keduanya. Hubungan yang terjadi antar pemerintah daerah dengan perusahaan, secara langsung sangat berdampak bagi kualitas informasi akuntansi perusahaan [36]. Hal ini ditandai oleh adanya pengaruh dari pejabat publik yang korup dan ditangkap, telah menanamkan budaya korupsi lokal yang mewabah [36], yang kemudian berdampak bagi tindakan perusahaan terhadap kapasitas mereka dalam melaksanakan operasional. Dengan demikian perusahaan harus bertindak hati-hati dalam berhubungan dengan pejabat publik yang korup serta menghindari pengaruh budaya korupsi yang mereka ciptakan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, serta menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah.

b. Tata Kelola Pemerintahan

Korupsi sangat kuat berpengaruh secara langsung terhadap tata kelola pemerintahan, walaupun disisi lain reformasi sistem akrual merupakan pendekatan untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik [45]. Berdasarkan bukti empiris dari hasil riset terdahulu ditemukan bahwa kebijakan agresif terhadap nilai akrual (*discretionary accruals*) pada pemerintah daerah, telah memperlebar celah korupsi [22]. Lebih jauh lagi menurut [22], kondisi ini justru memperburuk

pengaruh akuntabilitas maupun transparansi terhadap celah korupsi yang terjadi.

Dapat disimpulkan bahwasanya peluang melakukan kebijakan terhadap akrual, harus dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik akan terjadinya penyimpangan anggaran yang direncanakan. Publik harus mengawasi kondisi ini untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah, telah menggunakan dasar keputusan yang tepat bagi pelayanan publik. Oleh karena itu sangat penting mengendalikan tata kelola pemerintahan melalui sistem akrual dengan cara-cara yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan mendorong lahirnya fungsi dari sistem akrual untuk mencapai tingkat kinerja pemerintah daerah yang optimal atas dasar perencanaan anggaran yang sesuai [46].

c. Lingkungan Eksternal

Terkait dengan topik korupsi dalam lingkup sistem akrual pemerintah daerah, tidak dapat dipungkiri bahwasanya sistem tersebut tidak dapat berdiri sendiri, atau dengan kata lain pemerintah daerah membutuhkan akses dengan pihak eksternal atau stakeholder dalam mengendalikan keuangan daerah untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan publik. Bentuk akses yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui hubungan kerjasama yang saling mutualisme untuk mendukung program daerah, salah satunya adalah program subsidi riset untuk meningkatkan inovasi bagi perusahaan [35]. Setelah diteliti lebih jauh, ternyata [35] menemukan terjadi penurunan kualitas terhadap program subsidi yang dilakukan oleh pejabat daerah yang berwenang. Kondisi ini sangat jelas berpengaruh terhadap hasil subsidi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas program yang berdampak bagi kemajuan daerah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok adalah memecat dan memberikan sanksi hukum bagi pejabat yang telah melakukan korupsi terhadap dana subsidi tersebut, dan hasilnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas riset dan inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan. Selain itu, pemerintah terus menggalakkan program kampanye antikorupsi serta memberikan insentif karir bagi pejabat yang menangani program subsidi dengan baik.

Selain itu, perilaku korupsi yang dimiliki oleh pejabat publik di Cina, telah mempengaruhi perusahaan melalui cara-cara yang dilakukan dalam operasional maupun pembiayaan perusahaan [36]. Hal ini terjadi akibat adanya desakan pejabat yang korup terhadap ruang lingkup perusahaan yang beroperasi dan dampak dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Perilaku pejabat publik yang menjadi budaya korupsi lokal, turut mempengaruhi keuangan perusahaan dan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Menurut [40] di Amerika Serikat, perusahaan yang beroperasi di daerah dengan tingkat korupsi politik lokal yang tinggi cenderung melakukan manajemen laba baik melalui manajemen akrual maupun manipulasi aktivitas nyata, seperti percepatan penjualan dan overproduksi. Dapat dipastikan bahwa secara langsung perilaku korupsi pejabat daerah berkorelasi langsung dengan penurunan kualitas laporan keuangan perusahaan. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, perusahaan yang terkontaminasi dengan tingkat korupsi politik yang tinggi cenderung menyamarkan informasi dalam laporan keuangan [42]. Dengan demikian, hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan perusahaan, harus dibatasi melalui kebijakan

pemerintah daerah yang tidak merugikan perusahaan, terutama harus mengkomodir efeknya terhadap kesejahteraan publik. Pemerintah dapat mengatur atau mengendalikan perusahaan sepanjang tidak menyimpang dari aturan publik, serta dapat menyusun kebijakan anti korupsi untuk membendung meluasnya tingkat korupsi di kalangan pejabat publik.

d. Audit Pemerintah Daerah

Tindak lanjut hasil audit dan jumlah temuan audit merupakan dua hal yang harus dievaluasi dalam rangka mendorong kinerja bersih keuangan pemerintah daerah, terutama terkait permasalahan korupsi. Reformasi sistem akruwal yang berlandaskan pada *New Public management* (NPM) diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun faktanya, di Indonesia bahwa otonomi luas yang tercermin dari praktik NPM justru belum mampu meningkatkan transparansi dan pemberantasan korupsi secara efektif [38]. Malahan desentralisasi fiskal justru telah menciptakan celah korupsi dan bahkan cenderung mendorong perilaku korupsi secara berkelanjutan [39]. Lebih lanjut [38] menjelaskan bahwasanya warisan yang ditinggalkan oleh rezim Soeharto berupa ekologi budaya birokrasi telah menghambat reformasi sistem akruwal pemerintah.

Peran audit dalam hal ini sangatlah penting, karena banyak terdapat daerah yang masih belum melakukan perbaikan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keadaan ini harus ditindaklanjuti melalui komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat posisi audit, dengan cara salah satunya membentuk mekanisme pengawasan yang kuat seperti peningkatan audit independen yang efektif [39]. Selain itu juga dibutuhkan perbaikan lebih lanjut dalam pengendalian internal, kepatuhan regulasi, dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah potensi korupsi [26].

e. Keputusan Anggaran

Pentingnya sistem akruwal bagi pemerintah daerah, salah satunya dapat dijadikan alat untuk mencegah terjadinya korupsi yang dimulai dari saat penyusunan dan penetapan anggaran. Kesempatan atau celah korupsi disusupi melalui adanya keputusan anggaran yang lebih ditujukan pada sistem berbasis kas. Oleh karena itu diperlukan pengendalian yang baik melalui implementasi sistem akruwal. Namun faktanya, bukti empiris menjelaskan bahwa sistem akruwal yang ditujukan untuk mengawasi keputusan anggaran, masih harus diperkuat oleh adanya kepercayaan publik terhadap pimpinan atau pejabat serta adanya sistem pengambilan keputusan yang transparan dan bersifat kolektif [37]. Dari proses pengambilan keputusan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, publik berharap akan memperoleh sejumlah program yang ditujukan untuk kesejahteraan, baik dalam jangka pendek maupun keberlanjutan program dalam jangka panjang.

IV. KESIMPULAN

Proses pencegahan, pengawasan, sampai kepada pemberantasan korupsi, harus dilakukan oleh pemerintah daerah secara bersamaan melalui implementasi sistem akruwal yang lebih terstruktur dan dinamis. Berbagai bentuk kendala maupun tantangan untuk menghadapi aktor-aktor korupsi,

sangatlah mudah dilakukan sepanjang menggunakan strategi yang cukup dan berkelanjutan, serta memperkuat berbagai sistem secara internal. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi untuk meningkatkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas yang harus dijelaskan ke publik. Melalui adanya tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan daerah, harmonisasi hubungan mutualisme dengan stakeholder, menjaga profesionalisme sistem audit, sampai kepada transparansinya keputusan anggaran yang dibuat, akan sangat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah daerah harus mewaspadaai setiap tindakan aparat yang dinilai akan membahayakan kepentingan publik. Apabila terdapat kendala atau hambatan dalam mengendalikan korupsi, maka perlu dirancang ulang skenario yang lebih canggih dan tepat untuk mencegah sistematis korupsi memasuki roh transparansi maupun akuntabilitas. Dengan demikian nilai dari sebuah reformasi sistem akruwal, akan mendapat tempat sebagai pilar perubahan untuk menghadang korupsi yang sistemik dalam jaringan aktor yang sudah profesional.

V. KETERBATASAN DAN PENELITIAN BERIKUTNYA

Keterbatasan penelitian terletak hanya pada rentang waktu 2015-2025. Dengan demikian dapat dipastikan bagi penelitian berikutnya agar menambah waktu studi agar dapat mengcover isu atau fokus penelitian yang lebih luas dari berbagai sudut pandang. Penelitian berikutnya agar dapat mengeksplorasi lebih jauh setiap faktor-faktor yang ada pada setiap permasalahan atau fokus masalah yang diangkat dengan mengkaji berbagai jenis sektor publik lainnya. Melalui perluasan kajian, peran akuntansi akruwal dapat diukur lebih variatif yang mampu mendorong terciptanya informasi keuangan yang lebih unik namun tetap relevan dan reliabel.

Penelitian selanjutnya harus memahami dengan baik dimana fungsi pemerintahan tidak hanya sekedar sebagai regulator namun dapat bertindak sebagai motor dalam hubungannya dengan perusahaan dan stakeholder lainnya. Pemerintah membutuhkan kerjasama yang lebih baik dengan seluruh pihak eksternal untuk mendorong berjalannya kebijakan sistem akruwal secara komprehensif, agar menutup celah korupsi dari kedua belah pihak. Dengan demikian diperlukan adanya berbagai instrumen pihak eksternal yang memungkinkan sebagai peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan sistem akruwal dan kebijakan untuk mampu mendeteksi dan mencegah korupsi.

Penelitian ini juga berkontribusi bagi perkembangan sistem akruwal paling reformis dalam literatur keuangan sektor publik. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah atau pemangku kepentingan dapat merancang ulang regulasi terkait korupsi dan sistem akruwal melalui hasil-hasil riset yang bersifat dinamis dan aplikatif, terutama pengembangan sistem pendeteksian melalui teknologi untuk mengawasi tindakan dan perilaku korupsi yang mampu berperan dalam jaringan aktor dengan skenario sistem akruwal.

REFERENSI

- [1] D. Treisman, *The Causes of Corruption: A Cross-National Study*, vol. 76. 2000. doi: 10.1007/978-3-658-04633-0_1.
- [2] V. Tawiah, "The impact of IPSAS adoption on corruption in developing countries," *Financ. Account.*

- Manag.*, vol. 39, no. 1, pp. 103–124, 2021, doi: 10.1111/faam.12288.
- [3] A. Aminah, D. Suhardjanto, R. Rahmawati, and J. Winanrna, “The effect of the quality of local government financial reports on corruption moderated with the audit findings,” *Econ. Ann.*, vol. 197, no. 5–6, pp. 45–50, 2022.
- [4] B. D. Lewis and A. Hendrawan, “The impact of public sector accounting reform on corruption: Causal evidence from subnational Indonesia,” *Public Adm. Dev.*, vol. 40, no. 5, pp. 245–254, 2020, doi: 10.1002/pad.1896.
- [5] S. U. Rajib, P. Adhikari, M. Hoque, and M. Akter, “Institutionalisation of the Cash Basis International Public Sector Accounting Standard in the Central Government of Bangladesh,” *J. Account. Emerg. Econ.*, vol. 9, no. 1, pp. 28–50, Jan. 2019, doi: 10.1108/JAEE-10-2017-0096.
- [6] S. A. Muraina and K. I. Dandago, “Effects of implementation of International Public Sector Accounting Standards on Nigeria’s financial reporting quality,” *Int. J. Public Sect. Manag.*, vol. 33, no. 2–3, pp. 323–338, 2020, doi: 10.1108/IJPSM-12-2018-0277.
- [7] Gilberto Carrión-Barco, Rafael Damián Villón-Prieto, Edgar Mitchel Lau-Hoyos, Luis Roger Ruben Zapatel-Arriaga, Ricardo Chanamé-Chira, and Denny John Fuentes-Adrianzén, “Corruption in Public Administration: Evaluation of its Impact on Government Efficiency,” *Evol. Stud. Imaginative Cult.*, vol. 8.1, no. S2, pp. 453–475, 2024, doi: 10.70082/esiculture.vi.1117.
- [8] R. Hoinaru, D. Buda, S. N. Borlea, V. L. Văidean, and M. V. Achim, “The impact of corruption and shadow economy on the economic and sustainable development. Do they ‘sand the wheels’ or ‘grease the wheels’?,” *Sustain.*, vol. 12, no. 2, 2020, doi: 10.3390/su12020481.
- [9] M. H. Yusof, M. A. H. M. Haniff, Z. Kamaruddin, N. A. M. Jaafar, and S. B. Saihani, “Investigating the Causality between Corruption and Economic Growth: A Systematic Review,” *Inf. Manag. Bus. Rev.*, vol. 15, no. 4, pp. 292–501, 2023.
- [10] V. Burukin, V. Vezlomtsev, S. Vezlomtseva, and O. Zarubina, “Correlation of social mechanisms of corruption and social climate,” *E3S Web Conf.*, vol. 258, 2021, doi: 10.1051/e3sconf/202125805022.
- [11] D. A. Kulmie, M. D. Hilif, and M. S. Hussein, “Socioeconomic Consequences of Corruption and Financial Crimes,” *Int. J. Econ. Financ. Issues*, vol. 13, no. 5, pp. 88–95, 2023, doi: 10.32479/ijefi.14714.
- [12] I. N. Rachman, “Constitutional court, judicial independence, and efforts to achieve qualified justice,” *Hasanuddin Law Rev.*, vol. 5, no. 1, pp. 86–101, 2019, doi: 10.20956/halrev.v5i1.1471.
- [13] L. Barbabela, “Judicial Inconsistency and Citizen Anti-Corruption Demobilization: Evidence from Brazil,” *Gov. Oppos.*, vol. 60, no., pp. 168–187, 2023, doi: 10.1017/gov.2023.36.
- [14] A. F. Lutfi, Z. Zainuri, and H. C. Diartho, “Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN,” *e-Journal Ekon. Bisnis dan Akunt.*, vol. 7, no. 1, p. 30, 2020, doi: 10.19184/ejeba.v7i1.16482.
- [15] R. Remeikienė, L. Gasparėnienė, V. Chadyšas, and E. Raistenskis, “Links between corruption and quality of life in European Union,” *Entrep. Sustain. Issues*, vol. 7, no. 4, pp. 2664–2675, 2020, doi: 10.9770/jesi.2020.7.4(7).
- [16] F. N. Uchendu and T. O. Abolarin, “Corrupt practices negatively influenced food security and live expectancy in developing countries,” *Pan Afr. Med. J.*, vol. 20, pp. 1–7, 2015, doi: 10.11604/PAMJ.2015.20.110.5311.
- [17] M. I. Neshkova and V. Kalesnikaite, “Corruption and citizen participation in local government: Evidence from Latin America,” *Governance*, vol. 32, no. 4, pp. 677–693, 2019, doi: 10.1111/gove.12401.
- [18] A. Varraich, N. C. Köbis, and J. Lange, “The Social Psychology of Corruption,” *Eur. J. Soc. Psychol.*, vol. 55, no. 3, pp. 419–423, 2025, doi: 10.1002/ejsp.3165.
- [19] J. S. T. Quah, “Lee Kuan Yew’s role in minimising corruption in Singapore,” *Public Adm. Policy*, vol. 25, no. 2, pp. 163–175, 2022, doi: 10.1108/PAP-04-2022-0037.
- [20] J. W. Choi, “Corruption control and prevention in the Korean government: Achievements and challenges from an institutional perspective,” *Asian Educ. Dev. Stud.*, vol. 7, no. 3, pp. 303–314, 2018, doi: 10.1108/AEDS-11-2017-0111.
- [21] A. Alfada, “Does Fiscal Decentralization Encourage Corruption in Local Governments? Evidence from Indonesia,” *J. Risk Financ. Manag.*, vol. 12, no. 118, 2019.
- [22] R. R. Gamayuni, F. Dharma, and C. Cinintya, “The Effect of Good Government Governance and Discretionary Accrual on the Level of Corruption in Indonesia’s Local Government,” *Rev. Integr. Bus. Econ. Res.*, vol. 12, no. 4, pp. 184–198, 2023.
- [23] R. Salato, P. Gomes, and C. Ferreira, “Accrual accounting in the public sector of emerging economies: Bibliometric analysis and future research,” *Public Money Manag.*, vol. 0, no. 0, pp. 1–13, 2023, doi: 10.1080/09540962.2023.2200968.
- [24] A. B. Bonsu, K. O. Appiah, P. Gyimah, and R. Owusu-Afriyie, “Public sector accountability: do leadership practices, integrity and internal control systems matter?,” *IIM Ranchi J. Manag. Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 4–15, 2022, doi: 10.1108/irjms-02-2022-0010.
- [25] M. Kuroki, K. Ishikawa, and K. Yamamoto, “Understanding the impact of mandatory accrual accounting on management practices: interpretation of Japanese local governments’ behavior,” *Int. Rev. Adm. Sci.*, vol. 88, no. 3, pp. 862–881, 2022, doi: 10.1177/0020852321988956.
- [26] F. L. Utami, Y. M. Putra, P. Renalita, S. Tanjung, and L. Nugroho, “Analysis of Audit Opinion of Financial Statements From State Institutions : Indonesia Empirical Study , Period 2012-2017,” *Int. J. Financ. Res.*, vol. 11, no. 5, p., 2020, doi: 10.5430/ijfr.v11n5p150.
- [27] C. Lentner, P. Molnár, and V. Nagy, “Accrual accounting and public finance reforms in Hungary: The study of application in the public sector,” *Econ. Ann.*, vol. 183, no. 5–6, pp. 89–105, 2020, doi: 10.21003/EA.V183-09.
- [28] M. Javed and W. Zhuquan, “Analysis of accounting reforms in the public sector of Pakistan and adoption of cash basis IPSAS,” *J. Account. Financ.*, vol. 6, no. 2, pp. 47–53, 2018, [Online]. Available: <https://pdfs.semanticscholar.org/202d/61e4cfd915ad68a327ba4ff87dc2a0047a2.pdf>
- [29] H. Fahlevi, I. Irsyadillah, I. Arafat, and M. I. Adnan, “The inefficacy of accrual accounting in public sector

- performance management: Evidence from an emerging market,” *Cogent Bus. Manag.*, vol. 9, no. 1, 2022, doi: 10.1080/23311975.2022.2122162.
- [30] T. J. W. Prabowo, P. Leung, and J. Guthrie, “Reforms in public sector accounting and budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions and implementation,” *J. Public Budgeting, Account. Financ. Manag.*, vol. 29, no. 1, pp. 104–137, 2017, doi: 10.1108/JPBAFM-03-2018-002.
- [31] T. A. Mkasiwa, “The Magic of IPSAS Accrual: the real without reality,” *Int. J. Public Sect. Manag.*, vol. 35, no. 6, pp. 692–706, 2022, doi: <https://doi.org/10.1108/IJPSM-10-2021-0238>.
- [32] M. Kuroki, “Do non-financial performance and accrual-based cost information affect public sector budgeting?,” *J. Public Budg., Account. Financ. Manag.*, vol. 34, no. 6, pp. 95–116, 2022, doi: 10.1108/JPBAFM-03-2021-0056.
- [33] S. Cohen, M. Bisogno, and I. Malkogianni, “Earnings management in local governments: the role of political factors,” *J. Appl. Account. Res.*, vol. 20, no. 3, pp. 331–348, 2019, doi: 10.1108/JAAR-10-2018-0162.
- [34] M. Mir, H. Harun, and W. Sutiyono, “Evaluating the Implementation of a Mandatory Dual Reporting System: The Case of Indonesian Local Government,” *Aust. Account. Rev.*, vol. 29, no. 1, pp. 80–94, 2019, doi: 10.1111/auar.12232.
- [35] L. Fang, J. Lerner, C. Wu, and Q. Zhang, “Anticorruption, Government Subsidies, and Innovation: Evidence from China,” *Manage. Sci.*, vol. 69, no. 8, pp. 4363–4388, 2023, doi: 10.1287/mnsc.2022.4611.
- [36] Y. Chen, L. Che, D. Zheng, and H. You, “Corruption culture and accounting quality,” *J. Account. Public Policy*, vol. 39, no. 2, 2020, doi: 10.1016/j.jaccpubpol.2019.106698.
- [37] D. Indudewi, R. Rahmawati, A. N. Probohudono, and M. Muthmainah, “The role of budget decision making in mediating trust, social ties, cultural context and local government performance,” *Accounting*, vol. 7, no. 5, pp. 1055–1066, 2021, doi: 10.5267/j.ac.2021.3.003.
- [38] H. Harun, M. Mir, D. Carter, and Y. An, “Examining the unintended outcomes of NPM reforms in Indonesia,” *Public Money Manag.*, vol. 39, no. 2, pp. 86–94, 2019, doi: 10.1080/09540962.2019.1580892.
- [39] D. Ratmono and D. Darsono, “New public management and corruption: Empirical evidence of local governments in Indonesia,” *Public Munic. Financ.*, vol. 11, no. 1, pp. 54–62, 2022, doi: 10.21511/pmf.11(1).2022.05.
- [40] H. Xu, M. Dao, and J. Wu, “The effect of local political corruption on earnings quality,” *Rev. Quant. Financ. Account.*, vol. 53, no. 2, pp. 551–574, 2019, doi: 10.1007/s11156-018-0758-x.
- [41] R. Efendi, F. G. Dewi, and R. R. Gamayuni, “Usefulness analysis of accrual based accounting information on local government financial statement: A qualitative study,” *Int. J. Sci. Technol. Res.*, vol. 7, no. 11, pp. 10–21, 2018, [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85059854431&partnerID=40&md5=9a75f1f66e9eb1a5205384d94e588e6f>
- [42] H. Xu, M. Dao, J. Wu, and H. Sun, “Political corruption and annual report readability: evidence from the United States,” *Account. Bus. Res.*, vol. 52, no. 2, pp. 166–200, 2022, doi: 10.1080/00014788.2020.1815516.
- [43] B. D. Lewis, “Indonesia ’ s New Fiscal Decentralisation Law : A Critical Assessment,” *Bull. Indones. Econ. Stud.*, vol. 59, no. 1, pp. 1–28, 2023, doi: 10.1080/00074918.2023.2180838.
- [44] J. S. T. Quah, “Leadership and culture in combating corruption: a comparative analysis,” *Public Adm. Policy*, vol. 25, no. 2, pp. 193–207, 2022, doi: 10.1108/PAP-05-2022-0043.
- [45] C. Zurbriggen, *The Dilemmas of Governance in Latin America*. 2021. doi: 10.1108/978-1-83982-676-420201015.
- [46] D. Primasari, M. B. L. Gaol, S. Susiana, and F. Fuad, “The Implementation Effect of Accrual Based Accounting System to Organizational Performance with Two Moderating Variables (An Empirical Study in Indonesia),” *J. Bus. Retail Manag. Res.*, vol. 12, no. 4, pp. 158–166, 2018.